

ABSTRAK

Nazar Gumelar: *Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Analisis Putusan No.1316/Pdt.G/2016/Tmk. dan Putusan No.0124/Pdt.G/2017/Bdg.)*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan yang berbeda antara putusan PA Kota Tasik dan PTA Bandung yang memeriksa perkara perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan, Perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan ini dikabulkan majelis hakim PA dan menyatakan menanggukkan lelang hak tanggungan karena belum jatuh tempo dan tidak ada *fiat* pengadilan, Kemudian Para terlawan mengajukan banding ke PTA menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan *wanprestasi* serta memohon agar Terbanding membayar ganti rugi sebesar materil dan menyita harta benda milik Pelawan/Terbanding, Hakim PTA menyatakan bahwa lelang eksekusi hak tagungan tidak harus melalui *fiat* pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, landasan hukum hakim, metode penemuan hukum hakim tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan No. 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk dan No.0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran putusan pengadilan memiliki dimensi ganda yaitu putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum serta merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum oleh hakim. Dan Prinsip *murabahah* merupakan konsep jual beli barang antara kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (content analisis) terhadap putusan No.1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk dan No.0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan putusan antara PA Kota Tasikmalaya dan PTA Bandung dilatar belakangi *Pertama* Pertimbangan Hakim PA Kota Tasikmalaya mempertimbangkan ketentuan aturan lelang eksekusi hak agungan harus melalui *fiat* pengadilan, adapun majelis hakim PTA mempertimbangkan, Aturan bahwa lelang eksekusi hak angungan tidak memerlukan *fiat* pengadilan, *kedua* Landasan hukum yang digunakan majelis hakim PA pada pasal 6 UUHT angka 9 junto , pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT, pasal 224 HIR, Keputusan Ketua MA RI No: KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 ,Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AP, MA RI No.3201 K/Pdt/1984, SEMA No: 07 2012, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA Pedoman pembiayaannya diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan tertuang dalam APHT dan Klausul akad, MA RI No 995 K/Sip/1975 8 Agustus 1975, SE BUPLN No: SE-23/PN/2000 kewenangan untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tidak memerlukan *fiat* eksekusi pengadilan., dalam Metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim PA dan hakim PTA menggunakan metode penafsiran subsumtif, *ketiga* Tinjauan HES pada putusan PA dan PTA bahwa putusan ini sudah sesuai dan tepat dengan prosedur hukumnya karena nasabah telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Murabahah*, namun seharusnya bank memberi keringanan terhadap nasabah yang pailit karena islam melarang umatnya untuk berbuat dzalim kepada sesama dalam pemenuhan hak

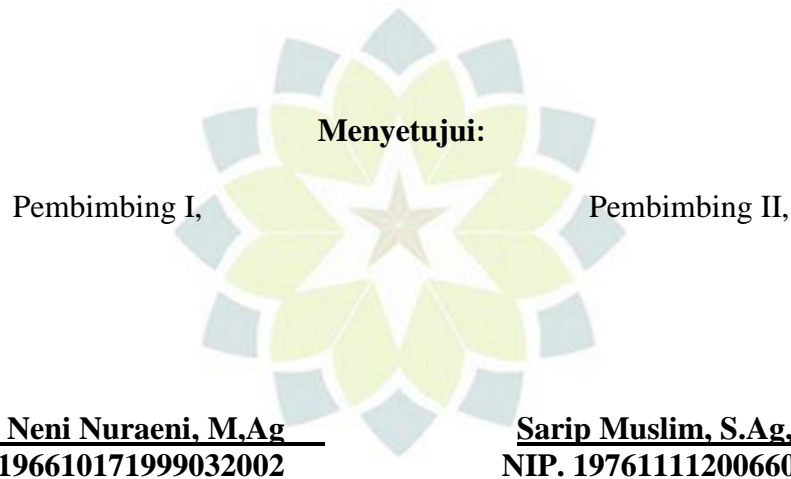
**PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA
PERKARA WANPRESTASI NASABAH AKAD *MURABAHAH* (Analisis**

**Putusan Nomor: 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Putusan Nomor:
0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.)**

Oleh:

Nazar Gumelar

NIM: 1153020111



u in

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Mengetahui:
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Jaenudin, M.Ag.
NIP. 197505142000031002

**PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI SYARIAH
PADA PERKARA WANPRESTASI NASABAH AKAD *MURABAHAH*
(Analisis Putusan Nomor: 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Putusan
Nomor: 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.
H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh:

**Nazar Gumelar
NIM. 1153020111**



**BANDUNG
2019 M/ 1441 H**